

Islam, Keindonesiaan dan Bhinneka Tunggal Ika

Elly Malihah

Universitas Pendidikan Indonesia

e-mail : ellyms@upi.edu

ABSTRACT:

The dialogue of Pancasila as the foundation of the state should be a final. The problem is, why must Pancasila be the foundation of the state of the archipelagic state of the Indonesia republic? A long discussion was going on during formulating it what would be the foundation of the independence's Indonesia in the meeting of investigating committee for preparatory work for independence so that the birth of Pancasila as the foundation of the state has been the right decision and visible. Pancasila as the foundation of Indonesia's independence has been tested sociologically because of Indonesia as a multicultural country contains the diversity of race, culture, and religion. This diversity may possibly appear a conflict, that is why it takes comprehension to live together in the bound of maintaining this diversity. Islam as the majority religion roles significantly in the birth of Pancasila as the foundation of the state. Nowadays, is it still required to debate between Islam, Indonesia, and the unity in diversity.

This article views how sociology's point of view about this issue, the writer tries to expose is based on the writer's perception and literature study. The result of this study shows that the practice of Islam influences the tradition of Indonesian; the source of Pancasila's value came from religious teaching and practice in society. The phrase of Bhinneka Tunggal Ika is the foundation and vision in the diversity.

Keywords: *Islam, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika*

ABSTRAK:

Perbincangan Pancasila sebagai dasar negara seharusnya sudah final, sebagai sebuah negara bangsa rumusan dasar negara telah melekat sepanjang hayat negara itu. Persoalannya, mengapa harus Pancasila menjadi dasar NKRI? Perdebatan panjang terjadi ketika merumuskan apa yang akan menjadi dasar negara Indonesia merdeka dalam sidang BPUPKI, sehingga lahirnya Pancasila sebagai dasar negara sudah merupakan pertimbangan matang dan berpandangan jauh ke depan. Pancasila menjadi dasar negara Indonesia merdeka telah teruji secara sosiologis, karena sebagai negara bangsa, Indonesia multikultur atau adanya keanekaragaman lingkungan alam, suku, ras, budaya dan agama namun masyarakat Indonesia dapat hidup secara harmonis. Keanekaragaman ini juga memungkinkan munculnya konflik, karena itu perlu ada satu kesepahaman untuk hidup bersama dalam ikatan yang memelihara keragaman tersebut. Islam sebagai agama mayoritas memainkan peran yang cukup signifikan dalam melahirkan Pancasila sebagai dasar Negara. Dalam era kekininian masihkah perlu diperdebatkan antara Islam, Keindonesiaan dan Kebhinekaan?

Artikel ini melihat bagaimana sudut pandang sosiologis tentang hal tersebut, Penulis mencoba mengurai berdasarkan pemahaman penulis sendiri serta berdasarkan studi literatur. Hasil studi menunjukkan bahwa praktik ajaran Islam saling memengaruhi dengan praktik tradisi /budaya masyarakat Indonesia; Sumber nilai Pancasila berasal dari ajaran agama dan praktik baik kehidupan bermasyarakat; Semboyan Bhinneka Tunggal Ika merupakan dasar sekaligus visi

hidup dalam keberagaman.

Kata Kunci: Islam, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika

PENDAHULUAN

Ada sebuah kalimat yang menyatakan bahwa Tuhan menciptakan Indonesia dalam keadaan tersenyum, hal ini sebagai wujud penegasan bahwa Indonesia adalah negara yang beruntung karena ditakdirkan memiliki beragam kekayaan, baik kekayaan flora dan fauna maupun kekayaan dan keragaman budaya. Indonesia juga memiliki wilayah yang terdiri dari daratan dan lautan luas, terbentang dalam garis Khatulistiwa dari Sabang sampai Merauke. Sungguh besar penciptaan Allah SWT untuk bumi Indonesia tercinta.

Indonesia menjadi negara kepulauan yang terletak diantara dua samudra dan dua benua dengan luas sekitar 9 juta km ([Welianto, 2020](#)). Terdapat 17.500 pulau yang menghiasi bumi Indonesia dengan garis pantainya yang tidak kurang dari 95.181 km. Kekayaan flora Indonesia menempati urutan ketujuh dunia dengan jumlah mencapai 20.000 spesies, 40% dari jumlah tersebut merupakan tumbuhan endemik Indonesia ([Kusmana & Hikmat, 2015](#)). Kekayaan fauna Indonesia menguasai 10% dari jumlah seluruh dunia. Data IBSAP (*Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan*) tahun 2015-2020 mengungkap ada 358.930 fauna Indonesia dalam berbagai jenis ([BAPPENAS, 2016](#)). Oleh karenanya, Indonesia menjadi negara “*megabiodiversitas*” ketiga di dunia.

Jumlah penduduk Indonesia berdasar data Ditjen Dukcapil pada triwulan II tahun 2018 mencapai angka 236,9 juta jiwa. Angka ini bukan tidak mungkin akan terus bertambah. BPS memproyeksikan pada rentang tahun 2015-2045 jumlah penduduk Indonesia dapat mencapai angka 264,2 juta jiwa ([Gischa, 2020](#)). Jumlah penduduk yang tidak sedikit ini berbanding lurus dengan banyaknya suku bangsa yang ada di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010 mengungkap ada sekitar 1.340 suku bangsa ([Welianto, 2020](#)) dengan 669 bahasa¹ sebagai kekayaan yang tak terhingga milik Indonesia.

Kekayaan dan keberagaman yang dimiliki Indonesia tidak akan berarti bagi kemajuan Indonesia manakala tidak dikelola dengan baik, karena itu diperlukan manusia Indonesia yang mampu mengelola dan memeliharanya. Kekayaan akan menjadi bencana bagi pemiliknya yang tidak mampu mengelola, bahkan bisa jadi kekayaan yang dimiliki akan dimanfaatkan

¹ Catatan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tahun 2018

bangsa lain sehingga kita menjadi “buruh” di negeri sendiri sementara mereka menjadi “tuan” di negeri kita.

Keberagaman yang dimiliki Indonesia tidak terbatas dari hal-hal yang bersifat fisik atau duniawi, kenyataan menunjukkan bahwa masalah yang bersifat keyakinan terhadap agama dan kepercayaan kepada Tuhan YME juga terjadi di Indonesia. Ada enam agama besar yang diakui oleh negara disamping banyaknya kepercayaan yang bersifat lokal yang diyakini oleh masyarakat Indonesia. Keberagaman akan kepercayaan dan keyakinan terhadap Sang Khalik tumbuh subur dalam praktik kehidupan masyarakat Indonesia namun tidak sedikit terjadi benturan baik inter maupun antar pemeluk agama/kepercayaan.

Hampir setiap agama mengandung suatu ajaran moral sebagai tata baku pegangan perilaku para penganutnya. Terdapat dua macam sisi yang meliputi hal tersebut: Sisi pertama, ada dalam suatu agama yang erat dengan ketentuan halal/haram, puasa/*tarak*, dan ibadat/ritual; Sisi kedua, ada aturan etnis yang lebih melampaui kepentingan suatu agama seperti larangan dalam membunuh, berdusta, dan/ mencuri. Sukar untuk mencapai kesepakatan antar agama dan moral. Keduanya sama penting karena berasal dari sumber yang sama yaitu Tuhan Yang Maha Esa.

Berbagai perbedaan dalam beragama baiknya diterima atas dasar argumen “iman” yang dimiliki oleh sesama umat yang beragama. Agama Islam dengan lima rukun Islam dan enam rukun imannya, Kristen dengan Trinitasnya, Budha dengan Tiga Mestika, Hindu dengan Panca Sradha, dan Khonghucu dengan Delapan Pengakuan Iman (*Ba Cheng Chen Gui*). Ada pula penganut penghayat aliran kepercayaan di Indonesia yang memasuki babak baru pada 7 November 2017 melalui pengakuan tertulis dalam KTP para penganutnya. Kesemuanya itu merupakan pengimanan yang sudah seharusnya dapat dimaknai dengan bijak antar sesama umat beragama.

Nilai-nilai Pancasila lahir jauh sebelum Indonesia merdeka, hal ini dapat ditemukan dalam praktik kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Keyakinan terhadap kepercayaan yang Maha Ghaib telah hadir dalam praktik ritual ajaran kepercayaan dan religi setempat, praktik kebersamaan dan saling tolong menolong serta berembung menyelesaikan masalah bersama menjadi kebiasaan yang diturunkan dalam praktik penyelenggaraan hidup bersama dalam sebuah sistem sosial yang terbangun sebagai sebuah entitas.

Oleh karena itu Pancasila sebenarnya merupakan cerminan dari sebuah mozaik keberagaman masyarakat Indonesia yang mengkritstal dalam sila-silanya. Dalam konsepsi

kehidupan berbangsa dan negara, Pancasila seharusnya sudah final dan tidak perlu diganggu gugat, karna sumber nilai Pancasila berasal dari masyarakat Indonesia yang diperkuat dengan sumber nilai dari agama, khususnya Islam. Namun demikian, ada yang masih mempertentangkan Pancasila dan Agama. Selain Pancasila bersumberkan dari nilai-nilai sosiokultural, Pancasila juga adalah hasil pemikiran para pendiri negara. Sebagai hasil pemikiran Pancasila bersifat filsafat sehingga tentu saja masih bisa diubah, lain halnya dengan agama (Islam) adalah wahyu Allah SWT, sehingga sifatnya final tidak boleh berubah sepanjang jaman. Karena itu membandingkan Pancasila dengan Agama Islam bukanlah hal yang patut dilakukan. Sekali lagi Pancasila bersumberkan pada ajaran agama, termasuk Islam sebagai agama mayoritas.

Artikel ini akan mengkaji bagaimana Islam, Keindonesiaan dan Kebhinnekaan merupakan unsur pembentuk NKRI yang berkait erat satu sama lain, karena itu melihat berbagai fakta cara praktik berislam di Indonesia seringkali berbeda dengan negara Islam lainnya, karena praktik melaksanakan Islam dan proses pewarisan budaya di Indonesia saling memengaruhi satu sama lain. Kajian sosiologis Pancasila, yang didalamnya termasuk nilai-nilai Pancasila, Pancasila sebagai dasar negara, dan Bhineka Tunggal Ika menjadi akar dalam pembahasan artikel ini. Bagaimana Pancasila dan Islam menjadi satu kesatuan yang dapat menguatkan negeri ketika mampu dimaknai dengan baik, serta pendekatan etnopedagogi sebagai wadah dalam membangun nilai-nilai Pancasila masa kini, Penulis mencoba mengurai berdasarkan perspektif penulis sendiri.

PEMBAHASAN

Keragaman bangsa Indonesia merupakan “*integrating force*” yang tidak hanya dapat mengikat masyarakatnya namun juga dapat menjadi penyebab berbagai benturan antar budaya, ras, etnik, agama, hingga berbagai nilai-nilai dalam kehidupan yang dianut oleh masyarakat. Oleh karena itu diperlukan satu ikatan kokoh untuk membangun komitmen bersama dalam membangun sebuah bangsa/negara. Para *founding father* memiliki kesepakatan untuk membentuk negara dengan mendasarkan pada Pancasila, sampai sekarang Pancasila diyakini dapat menjadi dasar yang kokoh untuk menyatukan keberagaman/kebhinekaan Indonesia.

A. Kajian Sosiologis Pancasila

1. Nilai-nilai Pancasila

Nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sudah terwujud dalam kehidupan bermasyarakat sejak sebelum Pancasila sebagai dasar negara dirumuskan dalam satu sistem

nilai. Sejak zaman dahulu, wilayah-wilayah di nusantara ini mempunyai beberapa nilai yang dipegang teguh oleh masyarakatnya, seperti: 1) percaya kepada Tuhan dan toleran; 2) gotong royong; 3) musyawarah; 4) solidaritas atau kesetiakawanan sosial, dan lain sebagainya.

Soekarno mengatakan bahwa nilai-nilai Pancasila digali dari bumi Pertiwi Indonesia. Soekanto menegaskan bahwa menurut sosiologi, suatu masyarakat pada suatu waktu dan tempat memiliki nilai-nilai tertentu ([Soekanto, 2007](#)). Dengan kata lain, nilai-nilai Pancasila berasal dari kehidupan sosiologis masyarakat Indonesia. Melalui pendekatan sosiologis, Pancasila dapat dikaji dalam struktur sosial, proses sosial, perubahan sosial, dan masalah-masalah sosial masyarakat Indonesia dari waktu ke waktu yang dapat disikapi dengan menggunakan standar nilai-nilai yang mengacu kepada nilai-nilai Pancasila.

2. Sumber Sosiologis Pancasila sebagai Dasar Negara

Yang dimaksud dengan sumber sosiologis, adalah sumber yang menjadi dasar dalam praktik kehidupan berbangsa/ bermasyarakat. Adapun sumber tersebut adalah: Pertama, nilai-nilai ketuhanan (*religiusitas*) sebagai sumber etika dan spiritualitas (*yang transendental secara vertikal*) dianggap penting sebagai dasar etika kehidupan bernegara. Menurut Pancasila, negara diharapkan dapat melindungi dan mengembangkan kehidupan beragama; Sedangkan agama seharusnya memainkan peran publik dalam memperkuat etika sosial. Sebagai negara yang dihuni umat beragama dan berkeyakinan, negara Indonesia diharapkan mampu menjaga jarak, melindungi diri dari segala agama dan kepercayaan, serta mengembangkan kebijakannya berdasarkan nilai-nilai agama.

Kedua, nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum kodrat dan karakteristik sosial (yang bersifat horizontal) dianggap penting sebagai dasar etika politik kehidupan bernegara dalam hubungan dunia. Prinsip nasionalisme yang luas mengarah pada persaudaraan dunia yang berkembang melalui eksternalisasi dan internalisasi.

Ketiga, nilai-nilai etika manusia harus tertanam kuat dalam lingkaran hubungan nasional yang lebih dekat sebelum menjangkau hubungan dunia yang lebih jauh. Indonesia memiliki prinsip dan visi kebangsaan yang kuat, tidak hanya mampu menyatukan ragam masyarakat menjadi sebuah komunitas politik yang kebaruan, tetapi juga mampu memberikan kesempatan untuk mencabut keberagaman masyarakat yang berada di akar tradisi dan sejarahnya masing-masing.

Keempat, nilai-nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, serta nilai-nilai dan cita-cita bangsa harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dengan berpedoman pada kearifan hikmah dalam

pelaksanaannya. Menurut prinsip refleksi dan konsensus, keputusan tidak ditentukan oleh kekuatan mayoritas atau minoritas dari elit politik dan pengusaha, tetapi didorong oleh hikmat / kebijaksanaan yang menjunjung tinggi rasionalitas dan kebijaksanaan sadar setiap warga negara tanpa kritis.

Kelima, nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai dan cita-cita nasional, dan demokrasi musyawarah semuanya berperan dalam mencapai keadilan sosial. Visi keadilan sosial menurut Pancasila membutuhkan keseimbangan antara peran manusia sebagai individu dan peran manusia sebagai makhluk sosial, serta antara perwujudan hak sipil dan politik dengan hak ekonomi, sosial dan budaya. Pandangan tersebut berlandaskan pada pemikiran Bierens de Haan dalam [\(Soeprapto, Bahar, & Arianto, 1995, p. 124\)](#) yang menyatakan bahwa keadilan sosial setidaknya mempengaruhi upaya pencarian negara ideal bagi bangsa Indonesia untuk membentuk negara dengan tatanan sosial asli Indonesia. Namun struktur sosial modern mengikuti perkembangan dan pedoman zaman, sehingga dapat dimaklumi jika para penyusun UUD 1945 meyakini bahwa cita-cita negara Indonesia (*de Indonesische Staatsidee*) harus bersumber dan diambil dari cita-cita bangsa Indonesia. masyarakat itu sendiri. [\(RISTEKDIKTI, 2016\)](#)

3. Bhinneka Tunggal Ika: Bersatu dalam Keberagaman.

Kekayaan Indonesia salah satunya adalah keragaman budayanya. Hal ini menjadi tantangan dan peluang tersendiri bagi masyarakat Indonesia. Tantangan karena ada tuntutan yang mengiringi dalam setiap keragaman budaya yaitu menjadikannya dalam satu garis horizontal yang berarti setara antara budaya satu dan lainnya. Masing-masing budaya memiliki nilai tersendiri yang tidak dapat dibandingkan dan dicari mana yang lebih bernilai, kesemuanya menempati posisi yang sama berharganya. Peluang bagi masyarakat Indonesia karena keberagaman budaya ini membawa Indonesia kepada satu entitas kultural yang utuh “milik Indonesia” dengan pembuktian ke-Bhinneka Tunggal Ika-an sebagai wadah berbagai keindahan dalam keragaman budaya Indonesia.

Tujuh puluh lima tahun Indonesia merdeka, sudah bukan waktunya lagi membicarakan tentang konflik yang dikarenakan keragaman budaya yang dimiliki Indonesia. Karena sejak awal kita menyebutnya dengan keragaman Indonesia bukan perbedaan yang dimiliki Indonesia jadi, tentu bukan untuk dibedakan antara satu budaya dengan budaya lainnya. Bersatu dalam keberagaman seakan sudah menjadi keharusan yang dimiliki bangsa Indonesia. Tanpa itu, bukan tidak mungkin cita-cita luhur bangsa sebatas pada narasi tanpa makna.

Ragam budaya Indonesia menjadikan masyarakatnya sebagai masyarakat yang multikultural, artinya terdapat keanekaragaman budaya yang dimiliki Indonesia termasuk di dalamnya keragaman bahasa, agama, adat istiadat, dan pola-pola sebagai tatanan perilaku anggota masyarakatnya. Masyarakat multikultur seperti Indonesia haruslah perpegang pada fungsi kebudayaan itu sendiri yaitu sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui semangat multikulturalisme. Semangat ini yang kemudian membawa masyarakat pada kesadaran penuh akan kesederajatan atau kesetaraan dalam keanekaragaman yang dimiliki Indonesia.

Multikulturalisme sebagai suatu ideologi mengarahkan masyarakat pada titik kesetaraan sosiokultural ([Setiadi & Kolip, 2011](#)). Ketika titik ini telah tercapai, masalah diskriminasi, marginalisasi, dan warga masyarakat “kelas dua” akan menambah cerita panjang sejarah perjuangan bangsa Indonesia pada masa kini dalam tombak Kebhinnekaan, yaitu membawa masyarakat multikultural dalam kesetaraan yang harmoni.

Kesetaraan dalam keberagaman, keberagaman yang menjadi jati diri bangsa dan menjadikannya sebagai identitas tersendiri bagi Indonesia tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang tertulis pada Garuda Pancasila sebagai lambang negara. Sekat-sekat perbedaan dilepas dalam mengusung kemerdekaan Indonesia. Berbagai perbedaan dilupakan karena ada satu tujuan penting yaitu persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang merdeka dan bersatu.

“Bhinneka” yang artinya “beragam”, “Tunggal” yang artinya “satu”, dan “Ika” yang artinya “itu”, dimaknai sebagai “Berbeda-beda tetapi tetap satu”. Terdapat nilai toleransi yang luhur dalam kata Bhinneka Tunggal Ika, toleransi terhadap keberagaman yang dimiliki Indonesia, menjadikannya sebagai makna inspiratif dan satu pilar kukuh dalam mewujudkan persatuan bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika bukan lagi sebagai semboyan biasa makna tetapi merupakan sebuah prinsip dasar dalam mempersatukan perbedaan dan menerima berbagai perbedaan untuk mewujudkan kepentingan bersama dan lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Indonesia dibangun di atas perbedaan, karena secara sosiologi terjadi keberagaman dalam praktik berbangsa. Perbedaan yang dimiliki Indonesia bukan untuk dipertentangkan, karena nyatanya perbedaan inilah yang membuat Indonesia menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang berpikir lebih jauh dari sekedar mencapai suatu tujuan, karena ada banyak hal (perbedaan) yang harus “diseimbangkan” dalam mencapai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Penghayatan terhadap Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika menjadi penting untuk dipahami dan dilakukan dalam bingkai masyarakat Indonesia yang multikultural. Terlebih pada masa kini, semakin banyak paham-paham radikal yang menjerumuskan semangat kesatuan dan persatuan bangsa yang mengatasnamakan kemerdekaan untuk Indonesia, padahal merdeka bagi Indonesia adalah bagaimana mengimplementasikan keduanya (Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika) dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat. Keberhasilan dalam pengimplementasian ini akan menjadi kemenangan tersendiri bagi masyarakat Indonesia.

B. Pancasila dan Islam

Islam merupakan sumber dari nilai-nilai Pancasila. Kendati begitu, masih banyak yang belum memahami dan tidak mempercayainya, memandang keduanya sebagai masing-masing konsep dan cita-cita yang berdiri sendiri, tanpa keterkaitan, dan tanpa keyakinan penuh dalam menjalankan setiap tuntunannya. Hal ini dibuktikan dengan masih terjadinya benturan akan pemahaman hukum Islam dan Pancasila sebagai dasar negara.

Sebagian kelompok berpendapat bahwa sudah sepatutnya Islam dijadikan sebagai landasan hukum negara Indonesia. Sebagian kelompok lagi, sebagai kelompok nasionalis berpendapat bahwa Pancasila menjadi dasar negara yang paling tepat karena, Indonesia bukanlah negara Islam. Kelompok ini beranggapan bahwa ketika menjadikan Islam sebagai dasar negara Indonesia, seakan mendirikan bangunan hukum Islam yang bukan pada tempatnya.

Islam merupakan agama yang universal, karena bukan hanya tentang beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa (*habluminallah*) tetapi juga mengenai hubungan antar sesama umat manusia (*habluminannas*), dan juga kepada sesama makhluk ciptaan Tuhan seperti hewan dan tumbuhan. Sederhananya, hal ini dapat dijadikan sebagai suatu keyakinan tersendiri bahwa di dalam Pancasila terdapat ruh yang menghidupkannya sebagai dasar negara yaitu melalui Islam.

Hal yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai perdebatan mengenai Islam dan Pancasila terjadi berlarut-larut. Substansi dari adanya Pancasila yang berdasar pada nilai-nilai agama terutama Islam harus lebih diperhatikan daripada “kepentingan politik” yang muncul dalam mengusung pro dan kontra Pancasila sebagai dasar negara. Membangun kesadaran bersama dalam menyepakati, menerima, dan utamanya memelihara secara bersama Pancasila sebagai ideologi negara dengan menempatkan Islam sebagai sistem nilai adalah hal yang penting dilakukan dalam penghayatan sebagai masyarakat yang luhur dalam beragama tetapi juga bernegara.

Keberagaman merupakan suatu keniscayaan yang sulit untuk dihindari. Islam sendiri mengakui bahwa manusia diciptakan dalam berbagai keberagaman yang ada, baik bangsa maupun suku. Sebagaimana Allah berfirman dalam [Al - Quran](#) Surat Al-Hujurat ayat 13:

“Yā ayyuhan-nāsu innā khalaqnākum min zakariw wa unṣā wa ja'alnākum syu'ubaw wa qabā`ila lita'ārafū, inna akramakum 'indallāhi atqākum, innallāha 'alīmun khabīr”. Artinya “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Mari kita lihat Islam dan Pancasila sebagai hubungan antara Islam dan nilai-nilai keindonesiaan. Kendati terdapat hubungan yang dialektis antara keduanya yaitu, pembenturan yang terjadi pada awal masa perumusan Pancasila dan sistem kenegaraan, dan penselarasan pada saat munculnya cendekiawan Muslim yang mampu mengharmonisasikan berbagai pertentangan antara Pancasila dan Islam, namun pada kenyataannya Pancasila tidak akan hidup jika ruhnya (Islam) tidak berada utuh dalam tubuh Pancasila itu sendiri

Allah berfirman dalam [Al - Quran](#) Surat Al-Qashash ayat 77:

“*Wabtagi fīmā ātākallāhud-dāral-āakhirata wa lā tansa naṣībaka minad-dun-yā wa aḥsing kamā aḥsanallāhu ilaika wa lā tabgil-fasāda fil-arḍ, innallāha lā yuḥibbul-mufsidīn*”. Artinya “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Keduanya, antara Pancasila dan Islam bukan untuk dipertentangkan. Mari kita lihat secara fungsional, yaitu Islam yang berfungsi sebagai agama yang hendak mewujudkan kesejahteraan bagi umat manusia dan semesta alam (*rahmatan lil 'alamin*), dan Pancasila sebagai tonggak dalam menjalankan fungsi berbangsa-bernegara ditengah keberagaman serta sebagai cara untuk mencapai dan melaksanakan nilai-nilai Islam sebagaimana yang disebutkan sebelumnya. Keduanya sangat dibutuhkan dalam menjalankan kehidupan bernegara, dan menjaganya terus berjalan merupakan kunci dalam menyeimbangkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan tentunya beragama.

C. Membangun Nilai Pancasila Masa Kini: Pendekatan Etnopedagogi

Nilai-nilai Pancasila dapat digali dari akar sosiologis masyarakat Indonesia. Heterogenitas yang dimiliki bangsa Indonesia membutuhkan payung tersendiri dalam menangkal berbagai

konflik yang mungkin terjadi akibat dari keberagaman yang ada. Pancasila sebagai dasar negara berfungsi sebagai pondasi dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan bernegara melalui pengamalan kelima silanya. *Pertama*, Ketuhanan Yang Maha Esa, keberagaman agama di Indonesia harus dipandang dan diyakini sebagai sesuatu yang menghidupkan keagamaan itu sendiri di tanah Indonesia Pertiwi, tanpa perdebatan dan pertentangan antara agama satu dan lainnya. Setiap agama “memiliki kepentingan” untuk menjalankan apa yang diyakininya sebagai tuntunan dan tuntutan dalam beragama dengan hikmat.

Kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini dapat dimaknai sebagai pengakuan atas keberagaman suku bangsa di Indonesia. Keberagaman yang dijunjung atas dasar persamaan derajat, hak dan kewajiban antara sesama manusia. Toleransi dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan menjadi hal prinsipil dalam mengamalkan sila kedua ini.

Ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ini memberi sinyal akan pentingnya persatuan dan kesatuan Indonesia di dalam wadah multikulturalnya. Berbagai kepentingan pribadi atau golongan yang muncul dalam bernegara diharapkan mampu diredam dengan pengamalan sila ketiga ini. Persatuan Indonesia menjadi wujud kebanggaan masyarakat sebagai warga negara Indonesia dan bertanah air Indonesia. Sila ketiga ini juga yang menjadi pedoman dalam tata pergaulan berbangsa dalam cermin Bhinneka Tunggal Ika.

Keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Multikulturalisme Indonesia membawa pada banyak sisi kepentingan yang mungkin akan bersinggungan antara satu dan lainnya. Pengamalan sila ini dapat dilakukan dengan mengedepankan kepentingan masyarakat dan mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan dengan semangat kekeluargaan. Pengambilan keputusan ini harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, beriringan dengan nilai kebenaran dan keadilan, serta dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat.

Kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini seakan menjadi penutup dalam tata kehidupan berbangsa Indonesia yang multikultural. Bahwa keberagaman yang ada tidaklah patut dijadikan alasan untuk tidak berlaku adil antar sesama manusia. Adil dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban diri sendiri, serta orang lain menjadi kunci keseimbangan dalam kehidupan bangsa Indonesia.

Pancasila menjadi pemersatu keberagaman di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila telah hidup dalam keseharian masyarakat Indonesia jauh-jauh hari sebelum perumusan dasar negara,

karena itu kembali ke Pancasila berarti kembali ke jati diri masyarakat Indonesia ([Malihah, 2017](#)). Keberagaman dalam berbagai bentuk kearifan lokal dapat menjadi suatu kearifan nasional melalui Etnopedagogi. Etnopedagogi menjadi suatu pendekatan mutakhir dalam pendidikan yang menawarkan sebuah konsep berbasis budaya, khususnya kearifan lokal. Pendalaman dan mengamalkan Etnopedagogi dalam menyikapi keberagaman Indonesia dan mengamalkan Pancasila masa kini berupaya membawa masyarakat pada reorientasi praksis pendidikan di Indonesia, bahwa membumikan Pancasila dapat dilakukan melalui pendalaman dan penghayatan berbagai kearifan lokal yang dimiliki Indonesia serta kemampuan menyikapi dan memberdayakan potensi nilai-nilai luhur budaya setempat.

Implementasi Kebhinnekaan Indonesia terjadi dalam mengamalkan Pancasila pada kehidupan sehari-hari, dan secara sederhana hal ini dapat dilakukan dengan pendalaman kearifan lokal dalam pendidikan yang harus selalu menyeimbangkan dengan kebutuhan dan tuntutan zaman. Etnopedagogi dijadikan sebagai suatu pendekatan dalam sistem pendidikan Indonesia karena dapat menjadikan akar rumput kebudayaan lokal sebagai dasar dalam pembentukan karakter bangsa. Pengamalan Pancasila masa kini selayaknya dibarengi dengan prinsip kepribadian dalam kebudayaan sebagai semangat dalam mengokohkan jati diri bangsa melalui *nation character building*.

Geertz (2007) mengungkapkan bahwa “kearifan lokal merupakan entitas yang sangat menentukan harkat dan martabat manusia dalam komunitasnya”. Oleh karenanya ketika nilai-nilai tradisi yang ada pada masyarakat tercabut dari akar budaya lokal, maka bukan tidak mungkin masyarakat tersebut akan kehilangan identitas dan jati dirinya. Tidak hanya itu, rasa bangga dan kepemilikan atas budaya lokal tersebut akan luntur.

Budaya bersifat umum dan berlaku di masyarakat secara luas, diwariskan dari generasi ke generasi dan berkembang menjadi nilai-nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat. Indonesia memiliki berbagai kearifan lokal yang telah membudaya dan tercermin dalam masyarakat seperti praktik keyakinan terhadap ajaran agama dan praktik keyakinan terhadap ajaran tradisi leluhur yang diwariskan secara turun temurun. Keunikan dari Indonesia adalah kesinambungan antara budaya dan agama. Keduanya saling mempengaruhi dalam praktik kehidupan sehari-hari. Hal ini tentu dapat dijadikan sebagai energi positif ketika dapat disikapi secara konstruktif. Penghayatan terhadap kearifan lokal dapat dimanifestasikan ke dalam akar nasionalisme Pancasila yang dimiliki Indonesia.

PENUTUP

Pancasila sebagai implementasi ajaran Islam. Di dalam Pancasila terdapat nilai Islam sebagai ruh, bagaimana Islam tidak memaksakan akan hadirnya satu keyakinan yang sama bagi manusia, termasuk keyakinan akan agama dan kepada Tuhan. Bagaimana Islam mengajarkan untuk saling toleransi dalam dinamika keberagaman di Indonesia. Tidak lupa pula, akan bagaimana Islam mengajarkan akan pentingnya hubungan baik, antar sesama umat manusia, melalui nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, keadilan bagi sesama manusia, dan cinta tanah air serta bersatu dalam keanekaragaman demi terwujudnya harmoni sosial.

Jika memang Kebhinnekaan terlalu sulit untuk diwujudkan, maka kita perlu hening sejenak untuk menghayati bagaimana pentingnya kebhinnekaan di negeri Indonesia tercinta. Tanpa ini, apakah Indonesia dapat menjadi Indonesia yang lebih indah? Jika memang konsep kebhinnekaan terlalu berat, mari kita bergeser pada konsep persatuan, karena kebhinnekaan adalah *sunnatullah*, sedangkan persatuan membutuhkan usaha bersama dan komitmen dalam berbangsa dan bernegara.

Penguatan karakter bangsa dapat dilakukan melalui nilai kearifan lokal baik atas dasar budaya maupun religi. Pembangunan karakter nilai keindonesiaan dimulai dari nilai-nilai kearifan lokal, termasuk nilai-nilai religius yang selanjutnya menjadi nilai nasional, kemudian siap menghadapi karakter global.

KESIMPULAN

Waktunya kita mengelaborasi Pancasila sebagai dasar negara, melalui perwujudan “beragama” di dalam masyarakat Indonesia yang multikultural. Membudayakan kembali nilai-nilai Pancasila dengan mendorong literasi agama dan kebangsaan yang baik bagi masyarakat, dan tidak hanya mengenalnya sebagai sesuatu yang berkaitan dengan kebangsaan tetapi juga tentang ke-beragama-an yang beragam di bumi pertiwi kita Indonesia. Kajian makna substansif terhadap nilai-nilai kearifan lokal perlu dilakukan dalam ranah-ranah pendidikan, baik pendidikan dalam keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Hal ini akan menumbuhkan kesadaran dalam memberi dan menerima seluruh elemen bangsa yang majemuk, dan semangat merajut kebhinnekaan. Ketika kebhinnekaan telah terwujud maka semangat nasionalisme yang kokoh akan tertanam dalam hati masyarakat Indonesia. Hasil rekonstruksi ini perlu dibumikan dan disebarluaskan ke dalam seluruh masyarakat sehingga menjadi identitas kokoh bangsa, bukan sebatas pada identitas suku atau masyarakat tertentu. Sebagaimana harapan mengenai karakter bangsa Indonesia yang tertuang dalam UU No 17/ 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2010-2025 yaitu berkarakter “tangguh, kompetitif,

berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotongroyong, patriotik, dinamis, berbudaya dan berorientasi Ilmu pengetahuan dan teknologi, seni berdasarkan Pancasila dan dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan YME.”

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran. (n.d.).

BAPPENAS. (2016, January). *Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan 2015 - 2020*. Retrieved from Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional: https://www.bappenas.go.id/files/publikasi_utama/Dokumen_IBSAP_2015-2020.pdf

Gischa, S. (2020, January 8). *Jumlah Penduduk Indonesia 2020*. Retrieved August 15, 2020, from Kompas.com: <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/08/060000069/jumlah-penduduk-indonesia-2020?page=all>

Kusmana, C., & Hikmat, A. (2015, November 3). *Keanekaragaman Hayati Flora di Indonesia*. Retrieved from Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (JPSL): <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jpsl/article/view/10962>

Malihah, E. (2016). *Membangun Nasionalisme dengan Pendekatan Etnopedagogi*. Retrieved from One Asia.

Malihah, E. (2017, May 31). *Pancasila di Simpang Jalan*. Retrieved from OPINI Pikiran Rakyat: <https://tandamatabdg.wordpress.com/2017/05/31/pancasila-di-simpang-jalan/>

RISTEKDIKTI. (2016, Juni). *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*. Retrieved from Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan: <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/mkwu/8-PendidikanPancasila.pdf>

Setiadi, E. M., & Kolip, U. (2011). *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Kencana.

Soekanto, S. (2007). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soeprapto, Bahar, S., & Arianto, L. (1995). *Cita Negara Persatuan Indonesia*. Jakarta: BP-7 Pusat.

Welianto, A. (2020, January 4). *Daftar Suku Bangsa di Indonesia*. Retrieved August 15, 2020, from Kompas.com: <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/04/210000869/daftar-suku-bangsa-di-indonesia?page=all>

BIOGRAFI PENULIS

Elly Malihah, lahir di Bogor, 25 April adalah seorang Guru Besar dalam Bidang Ilmu Sosiologi Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Sosiologi, Universitas Pendidikan Indonesia. Penulis juga mengajar matakuliah umum Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Pendidikan Indonesia. Penulis aktif menulis dan melakukan penelitian dalam bidang sosiologi pendidikan, pendidikan sosiologi, wawasan kebangsaan, gender dan kebudayaan Indonesia.